

Abstrak

PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) GUNA MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Septi Widia Sari

Pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan persoalan lalu lintas yang masih sering terjadi di Kota Bandar Lampung, terutama pelanggaran berupa pengendara yang tidak membawa SIM, pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), SIM yang tidak sesuai golongan, serta penggunaan SIM yang sudah kedaluwarsa. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum optimalnya peran polisi lalu lintas dalam menegakkan aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi bagaimana peran polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran SIM, dan apa saja faktor penghambat polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggabungkan studi kepustakaan serta wawancara terhadap empat narasumber, yaitu Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dosen hukum pidana, dan pengamat lalu lintas. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur akademik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi lalu lintas dilakukan melalui tindakan preventif, preemtif dan represif. Upaya represif dilakukan melalui penindakan hukum berupa tilang, E-tilang, teguran, dan razia yang dilakukan melalui operasi zebra dan patuh krakatau. Upaya preventif dilakukan melalui penempatan petugas keopilisian ditempat rawan pelanggaran, patroli rutin, dan ETLE. Adapun upaya preemtif dilakukan melalui beberapa upaya yaitu sosialisasi pentingnya memiliki SIM, *Police goes to school*, *Safety Riding*, Polisi cilik, dan Pemanfaatan media digital untuk edukasi kepemilikan SIM. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat beberapa hambatan, faktor yang utama

SEPTI WIDIA SARI

disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana yang belum memadai, serta adanya praktik “damai di tempat” antara oknum kepolisian dan masyarakat yang melanggar aturan dengan cara menilang tanpa adanya surat tilang dan denda yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Namun, selain itu sanksi denda yang dinilai ringan juga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar sehingga angka pelanggaran SIM tetap tinggi.

Saran dari penelitian ini yaitu perlunya peningkatan integritas aparat melalui pengawasan internal yang lebih ketat, perluasan penggunaan ETLE agar bisa mendeteksi pelanggaran terkait surat izin mengemudi, serta edukasi hukum secara berkelanjutan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan SIM agar lebih mudah diakses. Dengan demikian, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat meningkat sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan budaya hukum yang lebih baik.

Kata Kunci : Polisi, Lalu Lintas, Surat Izin Mengemudi

Abstract

PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) GUNA MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS (Studi di Polresta Bandar Lampung)

By

Septi Widia Sari

Violations of Driving Licenses (Surat Izin Mengemudi/SIM) remain a frequent traffic problem in Bandar Lampung City, particularly violations involving drivers who do not carry a driving license, do not possess a valid SIM during traffic inspections, use a SIM that does not correspond to the vehicle category, or use an expired SIM. These conditions indicate a low level of public legal awareness as well as the suboptimal role of traffic police in enforcing regulations as stipulated in Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The research problems focus on how traffic police perform their role in overcoming SIM violations and what factors hinder traffic police in addressing driving license violations.

This study employs normative juridical and empirical juridical methods by combining literature research with interviews conducted with four informants, namely the Head of the Traffic Unit of Bandar Lampung Police Resort, a judge of the Tanjung Karang District Court, a criminal law lecturer, and a traffic observer. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were collected from laws and regulations, legal documents, and academic literature. Data analysis was carried out qualitatively through identification, classification, and systematization to obtain a comprehensive understanding of the research object.

The results of the study indicate that the role of traffic police is carried out through preventive, preemptive, and repressive measures. Repressive efforts are implemented through law enforcement actions such as traffic tickets, electronic tickets (e-ticketing), warnings, and traffic inspections conducted through Operation Zebra and Operation Patuh Krakatau. Preventive efforts include the deployment of police officers in areas prone to violations, routine road patrols, and the application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Preemptive efforts are conducted through public legal education, including socialization on the importance of possessing a SIM, Police Goes to School programs, safety riding campaigns, the Police Cadet (Polisi Cilik) program, and the utilization of digital media for

SEPTI WIDIA SARI

education on driving license ownership. However, these efforts have not been optimally implemented due to several obstacles, primarily low public legal awareness, limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, as well as the existence of “on-the-spot settlement” practices between certain police officers and violators, in which tickets are issued without official ticket forms and fines are imposed inconsistently with statutory provisions. In addition, fines that are considered relatively light do not create a deterrent effect, resulting in persistently high rates of SIM violations.

This research suggests the need to strengthen the integrity of law enforcement officers through stricter internal supervision, expand the use of ETLE to detect driving license-related violations, and enhance continuous legal education in schools and communities. The government is also encouraged to improve the quality and accessibility of SIM issuance services. Through these measures, traffic order and road safety can be improved as a shared responsibility in fostering a stronger culture of law compliance.

Keywords: Police, Traffic, Driving License